

LAPORAN MONEV KINERJA INTERNAL TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan telah melakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Monev Kinerja Internal Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Adapun penyajian monev kinerja ini mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

Monev kinerja internal triwulan II dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan setiap triwulan sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Setelah melakukan Monev Internal Triwulan II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mengharapkan selain sebagai tolok ukur penilaian kinerja triwulan berikutnya juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program dan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sehingga tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target dapat tercapai sesuai rencana.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan monev kinerja triwulan II ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas capaian kinerja triwulan berikutnya untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tarakan, 10 Juni 2025
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E, M.M
Pembina /IVa
NIP. 19720822 2010011 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja PD

Evaluasi Renja perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan Hasil rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam melakukan Evaluasi perlu diperhatikan beberapa unsur pokok yaitu Tujuan yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah, sasaran untuk mewujudkannya, program, indikator kinerja, target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

a. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan integral dalam proses perencanaan yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang ada. Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga

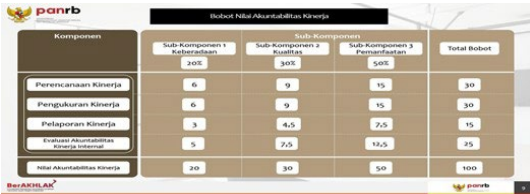
3. Terwujudnya kesejahteraan keluarga
4. Meningkatkan tata kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Fonnula	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPM=\sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG=(IPM \text{ Perempuan})/(IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Pengabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender	Badan Pusat Statistik	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG=1/3 \text{ (I(par) + I(DM) + Linc-dis)}$ I(par) = Indcks ke1er.vakil:rn di parlemen I(DM) = Indeks pengambilan kepurusan Linc-dis : Indeks distribusi pendapatan	Badan Pusat Statistik	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	= jlm kasus peremp usia 15-64 tahun/jlm perempuan usia 15-64 tahun*100 persen	Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduagan Anak
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	jlm kasus anak usia 13-17 tahun / jlm anak usia 13-17 tahun*100 persen	Data Bidang Pemberdayaaa Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.	Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$TFR = 5 \sum_i ASFR_i$	Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya dikalikan 100	Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP		APIP	Sekretariat

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra. Penetapan Kinerja ditetapkan pada DPA tahun 2025 disahkan. Perjanjian Kinerja tahun 2025 memuat target indikator kinerja atas sasaran serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan beserta anggarannya. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar monev kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
S.S.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
IKU 1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,8	93	93,5	94	94,5
IKU 2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,6	68,8	69	69,5	69,64
S.S. 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga						
IKU 3	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	0.00025	0.00024	0.00023	0.00022	0.00021
IKU 4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	0.00097	0.00096	0.00095	0.00094	0.00093
S.S. 3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga						
IKU 5	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2
IKU 6	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	62	62,5	62,8	63	63,3
S. S. 4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
IKU 7	Nilai SAKIP	85,9	86	86,5	87	87,5
IKU 8	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,74	88,75	88,76	88,77	88,78

BAB II
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target capaian indikator kinerja terhadap capaian kinerja. Capaian target kinerja hingga 1 April 2025 dan realisasi hingga 30 Juni 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja pada lampiran Laporan Monitoring dan Monev kinerja Internal triwulan II:

Dari tabel formulir pengukuran kinerja dapat dijelaskan bahwa beberapa kinerja dengan target triwulan II telah tercapai, sementara kinerja lain belum ada realisasi capaian kinerja dikarenakan target capaian kinerja dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Untuk Realisasi Anggaran triwulan II sebesar 2.324.242.170,00 (32,15%) dari total anggaran yang sudah kita anggarakan sebesar Rp. 7.227.616.973,00

Dalam Pelaksanaan program kegiatan pada triwulan II ada kendala yang dihadapi, dikarenakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengharuskan daerah menyesuaikan kembali Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) sehingga perlu dilakukan penyesuaian Sub Kegiatan pada Renja Dinas dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APBD).

FORMAT PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Program	Anggaran		Persentase
								Pagu	Realisasi	
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG	indeks	92,30	92,79	100,53	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	127.672.000	7.548.580	5,91
		IDG	indeks	60,13	68,54	113,99	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	35.150.180	0	0,00
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4.589.200	0	0,00

2.	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	%	0,03	0,00010	-99,64	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	267.594.580	28.294.093	10,57
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	%	0,12	0,00034	-99,60	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	225.947.750	2.520.000	1,12
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	362.921.370	58.716.625	16,18
3.	Mewujudkan keluarga berkualitas	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	67,2	70,55	104,99	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	231.951.400	27.415.400	11,82
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.118.546.000	284.167.753	25,41
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	637.219.750	84.960.000	13,33
4.	Meningkatnya Nilai LKIP	Nilai LKIP	Skor	72	85,87	119,26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.866.965.023	1.830.619.719	47,34
TOTAL								6.878.557.253	2.324.242.170	33,79

KENDALA : pengurangan anggaran demi efisiensi

TINDAK LANJUT : ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada indikator capaian kinerja posisi 30 Juni 2025 sesuai dengan target kinerja pada triwulan II yang telah ditargetkan pada rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, untuk persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara indikator lain belum tercapai karena target capaian pada triwulan ke empat.

Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Program	Anggaran		Persentase
								Pagu	Realisasi	
1.	Meningkatnya tata kelola DP3APPKB						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	dokumen	1	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.703.800	0	0
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.712.000	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah	laporan	1			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.240.000	0	0
		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	layanan	2	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan II
DP3APPKB

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.563.601.359	1.759.351.886	49,37
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000	17.302.500	29,36
Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	layanan	4	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	0	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.988.160	0	0,00
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	0	0,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.979.500	0	0,00
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	1	0	0,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.100.000		0,00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	7	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.213.880	9.284.180	35,42
Jumlah aset/BMD yang diadakan	layanan	1	0	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yg diadakan	unit	9	0	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.461.173	0	0,00
Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	layanan	5	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.931.218	25.370.953	33,41

		Jumlah aset/BMD yang dipelihara					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.000	0	0,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.528.934	17.310.200	35,67
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.870.000	0	0,00
TOTAL								3.866.965.023	1.830.619.719	47,34

KENDALA : pengurangan anggaran demi effisiensi

TINDAK LANJUT : ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPPA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Program	Anggaran		Persentase
								Pagu	Realisasi	
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	%	12,00	0	0	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	lembaga	1,00	0	0	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	OPD	30,00	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	27.672.000	7.548.580	27,28
		Jumlah lembaga yang dibina	organisasi	2	0	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

2		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	organisasi	2	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0
	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	%	100	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	0	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kegiatan	4,00	0	0	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.837.420	22.307.000	33,88
		Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	kasus	20,00	2	10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	90,00	2	2,22222222	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.037.300	5.987.093	5,20

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	4,00	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	72.002.960	0	0,00
<i>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi</i>	lembaga	1,00	0	0	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	50	0	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.851.220	0	0
Persentase Puspuga yang aktif	%	25	0	0	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
<i>Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</i>	<i>buah</i>	100	0	0	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1	0	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13.946.000	0	0

Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.398.200	0	0
<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	<i>organisasi</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	0	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.174.800	0	0
<i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	<i>layanan</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	layanan	40	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.000	0	0

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	100	0	0	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			
<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.451.400	0	0
Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	point	875	0	0	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>gugus tugas</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	39			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.459.200	0	0,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	24	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.697.500	2.520.000	6,68

<i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>					<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0,00
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	0	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.880.600	0	0,00
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>4 Kegiatan</i>				<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Perangkat daerah	1	0	0	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	82.170.000	26.769.000	32,58


<i>Jumlah kasus anak</i>	<i>kasus</i>	90	0	0	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	90	0	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.317.560	0	0,00
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	layanan	90	12	13,33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	203.716.100	19.546.745	9,60
<i>Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i>	<i>lembaga</i>	5	0	0	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	laporan	1	0	0	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	70.020.000	12.400.880	17,71

	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	orang	20	0	0	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	20.931.010	0	0,00
TOTAL							1.115.502.270	77.129.838	6,91

KENDALA : surat penyediaan dana hanya untuk rutin dan dak non fisik sehingga penyerapan tidak maksimal

TINDAK LANJUT : ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya

Tarakan, 14 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPKB

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENGUKURAN KINERJA BIDANG PPKB

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TRIWULAN : KEDUA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Program	Anggaran		Persentase
								Pagu	Realisasi	
1.	Meningkatnya Aseptor KB	Persentase keluarga yang terdata	%	50,00	0	0,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		Jumlah dokumen data keluarga	dokumen	1	0	0,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	dokumen	1	0	0,00	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.528.000	0	0,00
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga	dokumen	1	0	0,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	99.671.600	17.300.000	17,36
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	0	0,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	70.549.000	0	0,00

	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	1	0	0,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	51.202.800	10.115.400	19,76
	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	%	84	0	0,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>layanan</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan	1	0	0,00	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1.700.000	0	0
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	1	0	0,00	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	124.750.000	42.537.303	34,10

	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	1	0	0,00	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	87.598.000	26.400.000	30,14
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1	0	0,00	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.520.000	2.397.600	3,40
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	0	0,00	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.350.000	0	0
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	10	0	0,00	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90.226.000	46.456.000	51,49
	<i>Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	<i>orang</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>			
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader	80	0	0,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	142.924.000	0	0

		<i>Jumlah pelayanan KB</i>	<i>layanan</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	0	0,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.300.000	8.786.850	25,62
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	144	0	0,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	476.222.000	99.550.000	20,90
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	1	0	0,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	899.500	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	1	100,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.702.000	30.140.000	98,17

	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	<i>mitra kerja</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB</i>			
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	1	0	0,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	460.500	0	0
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	4	0	0,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	50.894.000	27.900.000	54,82
	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	%	100	0	0,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)			
	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>kegiatan</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			

	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	laporan	1	0	0,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	8.520.000		0,00
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	unit	20	0	0,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.999.050	0	0
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	orang	30	0	0,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32.791.200	0	0

	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	kelompok	2	0	0,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	6.807.500	0	0
	Jumlah kegiatan	kegiatan	2	0	0,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1	0	0,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	263.500.000	0	0
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	1	0	0,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	315.602.000	84.960.000	26,92
TOTAL							2.385.543.341	396.543.153	16,62

Tarakan, 14 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Tarakan. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001

Bukti Laporan Evaluasi AKIP Triwulan II
DP3APPKB

BAB III

PENUTUP

31.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Monev kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 Triwulan II adalah:

1. Capaian kinerja belum tercapai secara keseluruhan disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya Penyesuaian Juknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2025 sehingga diperlukan Penyesuaian Kembali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 (APBD).
2. Ada indikator capaian kinerja posisi 31 Maret 2025 sesuai dengan target kinerja pada triwulan I yang telah ditargetkan pada rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, untuk sementara indikator lain belum tercapai karena target capaian pada triwulan ke-empat.

31.2 Saran

Adapun saran untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yaitu:

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi setiap bulannya untuk diambil tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi.
2. Memotivasi SDM yang ada untuk terus meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik.

Lampiran :

1. Notulen Rapat
2. Dokumentasi Rapat
3. Absen

DOKUMENTASI RAPAT MONEV KINERJA TW II
Senin, 10 Juli 2025



NOTULEN
RAPAT MONEV KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Hari/Tanggal	: Senin, 10 Juli 2025
Waktu	: 08.00 wita sampai dengan selesai
Tempat	: Ruang Kerja Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan
Agenda Rapat	: Monev kinerja Triwulan II (April s/d Juni 2025)
1. Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan
2. Tujuan Rapat	: Monev kinerja, rencana aksi serta RTP dan mengetahui kendala pencapaian realisasi triwulan II
3. Peserta Rapat	: Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid PPPA, Kabid PPKB, Kasubag, Jafung dan pelaksana
4. Pembukaan oleh Kepala Dinas	: Kepala Dinas menyampaikan maksud dan tujuan diadakan rapat dan meminta kepada kepala bidang untuk menyesuaikan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada anggaran kas, jangan sampai serapan realisasinya rendah.
5. Jalannya Rapat oleh Sekretaris	: Rapat monev kinerja hari ini akan membahas 3 agenda, yaitu terkait evaluasi sakip, rencana aksi, rtp dan kendala dalam capaian realisasi triwulan II
6. Kabid PPPA & Kabid PPKB	: Penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana aksi dan tarikan anggaran kas, untuk sumber dana APBD rata-rata jadwal pelaksanaannya terletak pada triwulan triwulan III.
7. Kabid PPPA & Kabid PPKB	: Pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran berdasarkan perpres no 1 tahaun 2025
8. Kesimpulan	: Untuk kedepannya PPTK harus menyelaraskan tarikan anggaran kas yang sesuai agar serapan realisasinya sesuai dengan target.
9. Penutup oleh Sekretaris	: Rapat ditutup dengan harapan rapat monev kinerja hari ini dapat acuan perbaikan pada triwulan selanjutnya, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan tepat sasaran.

Tarakan, 10 Juli 2025
Mengetahui
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E, M.M
Pembina /IVb
NIP. 19720822 2010011 001

